

SKRIPSI

**BANTUAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK DITINJAU
DARI KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH:

D'WINA YENDRA
BP. 1910112081

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H., I., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg: 17/PKV/I/2023

**BANTUAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK DITINJAU
DARI KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

Disusun Oleh:

D'WINA YENDRA

1910112081

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 28 Februari 2023

Yang Rersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M.H.

NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL

NIP: 198208092005012002

Pembimbing I



Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

NIP: 197205162000031002

Pembimbing II



Beni Kharisma Arrasuh, SH.I., LL.M

NIP: 198303312015041001

Penguji I



Delfina Gusman, S.H., M.H.

NIP: 198205092005012002

Penguji II



Alsyam, S.H., M.H.

NIP: 196211251990031003

	No. Alumni Universitas	D'wina Yendra	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Dumai/29 Januari 2001 b. Nama Orangtua : Hendra Zulhija c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 1910112081	f. Tanggal Lulus : 28 Februari 2023 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan i. IPK : 3,85 j. Alamat : Depan SMP 14 Cupak Tengah, Pauh Padang	

BANTUAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK DITINJAU DARI KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

(D'wina Yendra, 1910112081, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pada hakikatnya peraturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik saat ini berpatokan pada perolehan suara sah di pemilu, menghadirkan pertanyaan nasib partai politik dengan perolehan suara tidak mencukupi kebutuhan partai dan nasib partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold*. Pembahasan permasalahan ini mengkaji bantuan keuangan negara kepada partai politik ditinjau konteks hukum tata negara Indonesia. Perumusan masalahnya: 1) Bagaimana politik hukum dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang dilaksanakan sampai saat ini? dan 2) Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau dari konteks hukum tata negara? Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dari buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan penulis, pertama, politik hukum dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang dilaksanakan sampai saat ini adalah terdapat kesenjangan regulasi terkait keuangan partai politik dari negara yaitu anggota partai yang berhasil duduk di badan legislatif membuat peraturan bantuan keuangan itu lebih menguntungkan partai politik tempat mereka bernaung sebelum di duduk kursi DPR RI, hal ini jelas merugikan masyarakat sebab dari awal peran dan kewajiban partai politik dalam menggunakan uang negara untuk pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi dari kepentingan rakyat telah melenceng. Pembahasan kedua yaitu konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau dari konteks hukum tata negara adalah KPU, BPK dan Bawaslu menjadi lembaga pelaksana yang memastikan proses pendirian, pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan penyebaran dana partai politik terlaksana secara proporsional, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Kata Kunci: Kebijakan Partai Politik, Dana Partai Politik, APBN

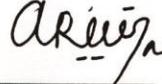
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 28 Februari 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Delfina Gusman, S.H., M.H.	Alysam, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: